



Posisi Turning Point USA sebagai *Civil Society* Sayap Kanan dalam Demokrasi Amerika Serikat

Yilmaz Omar Sebastian¹, Lyndia Aziza Shafarosa², Muradi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Kota Bandung, Indonesia

Email: ¹yilmaz22001@mail.unpad.ac.id, ²lyndia22001@mail.unpad.ac.id, ³muradi@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi Turning Point USA (TPUSA) sebagai *civil society* sayap kanan dalam konteks demokrasi Amerika Serikat serta melihat bagaimana organisasi ini memengaruhi dinamika politik kontemporer melalui strategi mobilisasi ideologis. TPUSA merupakan organisasi yang berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2012 oleh Charlie Kirk dan memosisikan diri sebagai gerakan konservatif yang fokus pada aktivisme politik di kalangan pemuda, terutama melalui jaringan pendidikan, media sosial, kampanye politik, dan wacana ideologis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis wacana untuk menelaah narasi, strategi komunikasi politik, dan praktik mobilisasi yang dilakukan TPUSA. Kerangka teori Philippe Schmitter digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik TPUSA sebagai aktor non-negara, sedangkan perspektif Muthiah Alagappa membantu menelaah peran ambivalen *civil society* yang tidak selalu demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPUSA merupakan *civil society* dengan orientasi ideologis konservatif yang kuat dan relasi erat dengan kepentingan politik Partai Republik, khususnya melalui afiliasi dengan Donald Trump. TPUSA tidak hanya memainkan peran edukatif dan advokatif, tetapi juga terlibat dalam peningkatan polarisasi politik, kampanye disinformasi, serta delegitimasi proses demokrasi melalui keterlibatan dalam gerakan “*Stop the Steal*”. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa TPUSA menjadi contoh nyata bagaimana *civil society* dapat berperan dalam erosi demokrasi ketika beroperasi secara partisan, eksklusif, dan ideologis.

Kata Kunci: *Civil Society*, Demokrasi, TPUSA, Polarisasi Politik, Konservatisme.

Abstract

This study analyzes the position of Turning Point USA (TPUSA) as a right-wing civil society organization in the context of American democracy and examines how it influences contemporary political dynamics through ideological mobilization. Since its establishment in 2012 by Charlie Kirk, TPUSA has rapidly developed as a conservative movement targeting youth political engagement through educational institutions, social media activism, and political campaigning. This research employs a library research method with a discourse analysis approach to examine TPUSA's narrative construction, communication strategies, and political agenda. Philippe Schmitter's civil society theory is used to explain TPUSA's role as a non-state actor, while Muthiah Alagappa's theoretical perspective highlights the ambivalent nature of civil society, which can either strengthen or undermine democracy. The findings show that TPUSA promotes conservative ideology while operating as an extension of partisan political interests closely connected to the Republican Party and Donald Trump's political network. Beyond advocacy and political education, TPUSA contributes to political polarization, delegitimization of democratic institutions, and the spread of disinformation, most evidently through its involvement in the “Stop the Steal” movement. This study concludes that civil society organizations may become instruments of democratic backsliding when driven by ideological exclusivity and partisan motives.

Keywords: *Civil Society*, Democracy, TPUSA, Political Polarization, Conservatism.

PENDAHULUAN

Kejadian penembakan Charlie Kirk pada 10 September 2025 memicu sorotan besar dalam ruang publik Amerika Serikat. Kirk sendiri dikenal sebagai tokoh konservatif muda yang vokal, kontroversial, sekaligus berpengaruh dalam dinamika politik. Selain menjadi sorotan publik, kejadian ini juga menjadi kematian tragis yang menimbulkan gelombang pro dan kontra, serta duka cita dari berbagai kalangan, termasuk dari Presiden Donald Trump yang menyatakan penghormatan atas karya dan pengaruh Kirk dalam menggerakkan generasi muda Amerika. Penembakan ini terjadi di dalam sebuah acara di Utah Valley University sebagai bagian dari tur debatnya “*The American Comeback Tour*” yang diselenggarakan oleh TPUSA. TPUSA ini sendiri didirikan dan diaktor utamai oleh Charlie Kirk sendiri sejak ia berusia 18 tahun. TPUSA atau Turning point USA didirikan pada tahun 2012 dengan misi utama mempromosikan prinsip-prinsip konservatif di kampus-kampus universitas yang cenderung liberal. Organisasi ini berkembang cepat dengan dukungan para donor dan relawan, mencakup ratusan cabang di perguruan tinggi dan sekolah menengah di Amerika Serikat. Kirk biasa menggerakkan pemilih muda melalui debat kampus, media sosial, podcast, dan acara-acara besar yang menonjolkan nilai-nilai pasar bebas, pemerintahan terbatas, dan nilai-nilai keluarga konservatif. Peristiwa yang terjadi membuka ruang refleksi mengenai warisan ideologis TPUSA sekaligus menguatkan perhatian terhadap peran organisasi masyarakat sipil berarah konservatif dalam demokrasi Amerika. TPUSA sebagai organisasi non-negara menunjukkan bagaimana aktor sipil dapat membentuk opini publik dan mengarahkan arah politik melalui advokasi dan mobilisasi generasi muda.

Dalam kerangka teori *civil society* yang dikembangkan oleh Philippe Schmitter dan Muthiah Alagappa, TPUSA adalah salah satu contoh modern dari organisasi masyarakat sipil yang berorientasi pada misi politik konservatif yang agresif dan terorganisasi baik, serta memanfaatkan ruang otonomi strategi kolektif untuk memengaruhi politik nasional dan demokrasi kontemporer. Philippe Schmitter (1993) mendefinisikan *civil society* sebagai sistem organisasi perantara yang memiliki empat norma dasar, yaitu: (1) otonomi ganda dari negara dan unit produksi, (2) kemampuan untuk melakukan aksi kolektif, (3) tidak menggantikan pemerintah dalam pengelolaan politik secara keseluruhan, dan (4) menjalankan aktivitas dengan perilaku sipil dalam interaksi politik. Schmitter menegaskan bahwa *civil society* berkontribusi pada konsolidasi demokrasi dengan menstabilkan harapan sosial, menyebarkan norma demokrasi, menyediakan saluran aspirasi publik, meskipun adanya potensi efek negatif dari fragmentasi sosial yang dapat menghambat pembentukan mayoritas atau mendorong segmentasi sosial yang berbahaya bagi demokrasi. Selain itu, menurutnya, *civil society* bukan aktor tunggal, melainkan arena persaingan kelompok kepentingan beragam yang memengaruhi proses politik secara kritis.

Kemudian adapun Muthiah Alagappa (2004), menekankan bahwa masyarakat sipil adalah arena dinamis yang menunjukkan keragaman dan ketegangan yang memperluas atau menyempitkan ruang demokrasi. Alagappa mengatakan bahwa pertumbuhan *civil society* bergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi, termasuk peran negara dan kondisi legitimasi sistem politik. Ia juga menyoroti bahwa *civil society* tidak selamanya prodemokrasi karena adanya kelompok dengan tujuan eksklusif atau menggunakan cara kekerasan yang berada di luar definisi dari masyarakat sipil. Dengan kerangka dari pemikiran Alagappa, TPUSA dapat dipandang sebagai sebuah aktor penting dalam *civil society* yang memobilisasi generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam proses politik berdasarkan agenda konservatif, sekaligus membentuk narasi alternatif di ruang publik yang kritis terhadap arus utama dimana hal ini juga mencerminkan bahwa *civil society* dapat menjadi arena persaingan ideologis hingga strategi politik. Kemudian, berdasarkan konsep Schmitter juga membantu memahami bahwa TPUSA bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa biasa, melainkan sebagai aktor *civil society* yang strategis mengintervensi bagaimana opini dan kebijakan publik dibentuk dengan metode aksi kolektif dan normatif yang jelas, mengikuti batasan tidak mengambil alih fungsi negara, namun memengaruhi arena politik secara signifikan.

Menurut penjelasan tersebut, TPUSA benar-benar memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan kerangka masyarakat sipil Schmitter dan Alagappa. Meskipun demikian, meskipun TPUSA memiliki pengaruh yang signifikan di ruang publik, hanya ada beberapa penelitian akademis yang secara khusus melihat TPUSA sebagai aktor politik yang sangat kompleks. Semua literatur yang telah diterbitkan sebagian besar bersifat jurnalistik atau deskriptif tentang aktivitasnya; namun, tidak ada yang secara mendalam mempelajari strategi dan pengaruh mereka terhadap institusi demokrasi. Akibatnya, kebaruan utama (*novelty*) dari penelitian ini adalah bahwa TPUSA diposisikan secara kritis sebagai bukan hanya masyarakat sipil sayap kanan biasa, sebaliknya, itu diposisikan sebagai studi kasus utama dari masyarakat non-sipil yang terorganisir dan memiliki pendanaan yang besar. Salah satu faktor yang membuat analisis ini unik dan penting adalah karena ia melengkapi literatur yang belum ada. Fokus penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana TPUSA, sebagai fenomena baru yang sangat signifikan, secara aktif berkontribusi pada kemunduran demokrasi Amerika Serikat. Artikel ini sebagian besar membahas bagaimana taktik

komunikasi dan mobilisasi TPUSA berfungsi di dalam sistem demokrasi. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana organisasi tersebut memanfaatkan wacana publik dan platform media modern untuk menormalkan agenda iliberal dan mendelegitimasi sistem demokrasi yang ada. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana ideologi radikal dan personal branding digital dapat mempertahankan dan melanjutkan agendanya, seperti yang ditunjukkan oleh kematian Charlie Kirk. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang posisi TPUSA, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis penting tentang bagaimana aktor uncivil society modern menggunakan arena digital dan publik untuk merusak kualitas demokrasi. Ini adalah fenomena penting dalam konteks polarisasi AS saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk mengkaji peran Turning Point USA sebagai organisasi masyarakat sipil sayap kanan dalam demokrasi Amerika Serikat. Pemilihan metode studi pustaka didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif dan teoritis, yakni memahami konstruksi makna, ideologi, serta strategi komunikasi TPUSA sebagaimana tercermin dalam teks dan praktik diskursifnya. Karena penelitian ini berfokus pada analisis makna, narasi, dan relasi kekuasaan yang terekam dalam sumber tertulis dan digital, bukan pada data empiris lapangan, maka studi pustaka dianggap paling tepat untuk menggali berbagai sumber sekunder yang telah dipublikasikan seperti buku, jurnal akademik, laporan organisasi, berita media, dan konten digital TPUSA. Pendekatan analisis wacana kritis (AWK) dipilih sebagai teknik analisis utama karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan *apa* yang TPUSA katakan, tetapi *mengapa* dan *bagaimana* bahasa tersebut berfungsi. Sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami strategi mobilisasi ideologis, AWK menyediakan alat untuk membongkar bagaimana narasi, simbol, dan retorika TPUSA digunakan secara strategis untuk membentuk opini publik, mereproduksi ideologi konservatif, serta mencerminkan (dan menantang) relasi kekuasaan dalam lanskap sosial-politik Amerika.

Secara teknis, penerapan analisis wacana kritis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Pemilihan dan pengumpulan data teks, meliputi pidato publik Charlie Kirk dalam acara seperti *AmericaFest* dan *The American Comeback Tour*; unggahan media sosial resmi TPUSA (Instagram, X, YouTube, dan situs web); serta proyek digital seperti *Professor Watchlist* dan *School Board Watchlist*.
2. Pembacaan intensif dan pencatatan konteks wacana, mencakup latar sosial-politik, aktor yang terlibat, serta tujuan komunikasi.
3. Pengodean tematik terhadap kata, kalimat, dan simbol yang menonjol, untuk mengidentifikasi tema-tema ideologis seperti nasionalisme Kristen, maskulinitas konservatif, serta anti-liberalisme.
4. Analisis hubungan antara teks, praktik diskursif, dan struktur sosial, guna menelusuri bagaimana wacana TPUSA merefleksikan dan memperkuat relasi kekuasaan di antara aktor politik sayap kanan Amerika.

Analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori civil society Philippe Schmitter dan Muthiah Alagappa. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi interpretasi antara teori, data, dan konteks historis. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana TPUSA menggunakan bahasa, simbol, dan strategi komunikasi untuk memengaruhi opini publik serta meneguhkan posisi ideologisnya dalam lanskap civil society Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Turning Point USA

Turning Point USA (TPUSA) adalah organisasi mahasiswa konservatif yang didirikan pada tahun 2012 oleh Charlie Kirk.. TPUSA mengklaim dirinya sebagai organisasi mahasiswa konservatif yang paling berkembang pesat di Amerika Serikat, Organisasi ini juga dikenal karena mengadakan acara puncak tahunan yang sangat ramai, menarik perhatian banyak selebritas muda konservatif. Dengan dukungan dari para donor yang sebagian besar merupakan aktivis konservatif, pengusaha mandiri, dan pebisnis, TPUSA berhasil mengumpulkan hampir \$85 juta pada tahun 2024 (*PaddockPost*, 2025). Dukungan ini juga berkontribusi pada ekspansi organisasi yang pesat. Hingga kini, TPUSA memiliki kehadiran di lebih dari 3.500 institusi pendidikan, lebih dari 850 cabang kampus, serta perwakilan di semua 50 negara bagian di AS. Aktivis TPUSA sering mengirimkan pembicara sayap kanan ke kampus-kampus dan menyelenggarakan konferensi untuk mendiskusikan isu-isu sosial kontemporer seperti ras, imigrasi, dan kebijakan publik dari sudut pandang konservatif ala MAGA (*Make America Great Again*) (*Politico*, 2018).

Pada dasarnya, TPUSA bertujuan untuk membangun jaringan aktivis konservatif yang terorganisir, aktif, dan kuat di kalangan mahasiswa, dengan fokus pada kampus-kampus sekolah menengah dan perguruan tinggi. Menurut website TPUSA, mereka percaya bahwa setiap generasi muda bisa diajarkan nilai-nilai pasar bebas yang sejati dan ingin memperkenalkan prinsip-prinsip ini di kalangan siswa dan mahasiswa di seluruh negeri. Turning Point USA (TPUSA) telah berkembang menjadi salah satu suara utama gerakan konservatif di kalangan anak muda Amerika, khususnya mahasiswa di universitas-universitas yang cenderung liberal. Misi utama TPUSA adalah memberdayakan aktivis muda untuk terlibat dalam perjuangan mendukung pasar bebas dan pemerintahan yang terbatas. Organisasi ini membangun jaringan kampus yang kuat, menyelenggarakan konferensi, dan membekali aktivis dengan pengetahuan serta strategi untuk menghadapi ideologi kiri. Untuk memperluas jangkauannya di luar ranah kampus, pendirinya, Charlie Kirk, juga membentuk beberapa organisasi turunan. Salah satunya adalah Turning Point Faith, yang diciptakan untuk memperkuat peran nasionalisme Kristen dan memobilisasi basis pemilih religius. Selain itu, terdapat pula Turning Point Action, yang berfungsi sebagai sayap politik untuk melakukan aksi dan advokasi langsung, termasuk pengorganisasian massa dan upaya kemenangan pemilu. Kombinasi antara infiltrasi politik di tingkat kampus dan mobilisasi melalui cabang-cabang spesifik ini memungkinkan TPUSA untuk menanamkan pengaruhnya secara luas baik di lingkungan akademik maupun di panggung politik nasional.

Bagaimana TPUSA Menyebar Gerakan Mereka

Turning Point USA (TPUSA) dan organisasi konservatif kampus serupa secara sengaja fokus pada sekolah-sekolah yang bersifat liberal atau condong ke kiri (CNN, 2021) karena lingkungan ini dianggap sebagai benteng ideologi progresif dan budaya pemuda. Dengan menargetkan institusi-institusi ini, TPUSA bertujuan untuk menantang apa yang mereka pandang sebagai narasi dominan kaum kiri, menciptakan oposisi yang terlihat, dan memberikan semangat kepada mahasiswa konservatif yang mungkin merasa terpinggirkan. TPUSA menggunakan acara-acara bergengsi seperti *AmericaFest* dan *Tur Kampus*, kampanye media sosial, dan tindakan provokatif di kampus-kampus liberal untuk menarik perhatian dan memposisikan diri mereka sebagai pembela kebebasan berbicara dan nilai-nilai konservatif. Tindakan-tindakan ini sering memicu respons dari mahasiswa dan dosen progresif, yang kemudian diperbesar oleh TPUSA melalui media digital untuk menggambarkan mahasiswa konservatif sebagai pihak yang sedang diserang, memperkuat narasi mereka dan memperluas jangkauan mereka secara nasional.



Gambar 1. Kyle Rittenhouse Bintang Tamu AmericaFest 2021



Gambar 2. Donald Trump sebagai Bintang Tamu AmericaFest 2024

AmericaFest Merupakan sebuah konferensi dan pertemuan politik tahunan. Acara ini diadakan di Phoenix, Arizona, dan fokus utamanya adalah mempromosikan nilai-nilai dan ideologi politik konservatif, khususnya di kalangan anak muda. Berlangsung selama empat hari, konferensi ini menampilkan pembicara-pembicara ternama dari dunia politik dan media konservatif, seperti politisi, komentator, dan aktivis. Acara ini sering digambarkan memiliki suasana yang energik dan mirip konser, lengkap dengan pencahayaan dan musik yang meriah. Tujuan utamanya adalah untuk menginspirasi dan memobilisasi generasi muda agar lebih aktif dalam gerakan konservatif.

Menurut *Berthoud Weekly Surveyor* (2025) Skala acara ini terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, dilaporkan lebih dari 20.000 orang berkumpul, sebuah angka yang disebut-sebut meningkat dua kali lipat dari jumlah peserta pada tahun sebelumnya. Sebagai panggung utama bagi gerakan konservatif, *AmericaFest* dikenal karena selalu menghadirkan jajaran pembicara terkemuka, termasuk beberapa tokoh yang kontroversial. Sebagai contoh, pada tahun 2022, salah satu tamu yang diundang adalah Kyle Rittenhouse, sosok yang dikenal luas setelah insiden penembakan dalam protes *Black Lives Matter* (BLM) di Kenosha, Wisconsin pada tahun 2020. Selain itu, hadir pula komentator politik sayap kanan, Candace Owens di *AmericaFest* 2022. Pada tahun 2024, daftar pembicara utama diisi oleh nama-nama besar seperti Donald Trump dan komentator media populer, Tucker Carlson. Kehadiran tokoh-tokoh ini menjadikan *AmericaFest* sebagai salah satu pertemuan paling penting bagi kaum muda konservatif di seluruh negeri.

Charlie Kirk bersama organisasi *Turning Point USA* (TPUSA) secara rutin melakukan tur ke berbagai kampus di Amerika Serikat dengan tujuan meraih dukungan dari kaum konservatif muda. Dalam tur tersebut, Kirk sering mengadakan sesi debat publik yang melibatkan audiens secara langsung, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan menantangnya. Pada musim panas 2025, ia juga mengunjungi Inggris dan berdebat dengan mahasiswa di University of Oxford serta University of Cambridge, memperluas jangkauan pengaruhnya secara internasional. Tur kampus ini berperan penting dalam mengembangkan pengaruh TPUSA dan memperkuat kehadiran Charlie Kirk di dunia digital. Segmen-segmen debat tersebut sering dipotong menjadi klip-klip singkat yang diunggah di platform seperti *TikTok*, *Instagram*, dan *YouTube*. Konten-konten ini menarik perhatian besar karena pernyataan kontroversial Kirk, yang memicu interaksi tinggi berupa like dan komentar dari pengguna. Aktivitas tersebut selanjutnya meningkatkan jangkauan video melalui algoritma media sosial, memperkuat dampak dan eksposur tur kampus dalam menyebarkan pesan konservatif kepada audiens muda.

Turning Point USA (TPUSA) secara aktif menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk mempromosikan organisasi dan menjangkau anak muda. *Turning Point USA* sendiri memiliki gabungan pengikut yang mencapai puluhan juta orang, tersebar di berbagai platform media sosial. Mereka secara aktif merekrut individu untuk menjalankan program-program media sosial mereka. Influencer paling terkenal dari gerakan ini, yang juga memiliki dampak besar dalam perkembangan konservatisme, adalah Charlie Kirk. Ia menjadi sosok sentral dalam pertumbuhan *Turning Point USA* hingga wafat secara mendadak pada September 2025. Salah satu strategi utamanya adalah melalui konten serial seperti *The Charlie Kirk Show*, yang menampilkan diskusi, debat, dan narasi konservatif yang dikemas secara menarik dan mudah diakses melewati platform media sosial. Menurut Tebbaldi (2021) TPUSA memanfaatkan simbolisme politik berbasis Kristen serta Maskulinitas dan Femininitas dalam branding mereka. Untuk memberi makna religius pada agenda konservatif mereka sehingga dukungan politik dipersepsikan sebagai tindakan iman. Simbol-simbol Alkitab seperti ayat suci pada kaos *Proclaim Streetwear*, gambar singa dan anak domba, atau slogan “*Socialism Sucks*” yang dikaitkan dengan “peperangan rohani” dijadikan komoditas mode yang sekaligus mengirim pesan ideologis. Dalam acara besar seperti *AmericaFest*, pidato tentang “menyelamatkan bangsa” dilapisi retorika Kristen yang menggabungkan nasionalisme dengan gagasan “perjuangan suci”. Dengan cara ini, TPUSA mengemas politik konservatif sebagai ritual religius dan identitas moral, menjadikan setiap atribut dari merchandise, musik, hingga bahasa perang bukan sekadar aksesoris, tetapi tanda politik yang menegaskan bahwa membela kapitalisme dan menolak sosialisme adalah wujud kesetiaan kepada Tuhan dan bangsa.

Polarisasi Politik Dalam *Civil Society* Amerika Serikat

Menurut Hadiwinata (2005), ketika kita mengasosiasikan *civil society* dengan demokrasi, kita seringkali mengabaikan kekuatan-kekuatan tertentu yang ada di dalam masyarakat, seperti kelompok ekstrimis, fanatis, milisi, dan preman. Kelompok-kelompok ini, yang secara otomatis menjadi bagian dari *civil society*, berpotensi mengganggu proses demokratisasi dan bahkan dapat membuat konsolidasi demokrasi menjadi sangat sulit dicapai. Ini terjadi karena meskipun mereka bagian dari masyarakat sipil, peran dan tindakan mereka dalam ruang publik seringkali kontraproduktif terhadap upaya menciptakan ruang demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Organisasi seperti *Turning Point USA* (TPUSA), yang sering dianggap sebagai kelompok fanatis pendukung Trump, serta kelompok-kelompok radikal seperti *Proud Boys* dan *Oath Keepers* di sayap kanan, maupun Antifa di sayap kiri, semuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari *civil society*. Namun, meskipun mereka beroperasi dalam ruang ini, praktik mereka justru dapat merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Ini terjadi karena mereka cenderung saling mendominasi dan bertindak dengan cara yang menegasikan keberadaan satu sama lain. Ketegangan yang terjadi di antara kelompok-kelompok ini menciptakan polarisasi yang semakin dalam, yang akhirnya mempersulit terciptanya dialog yang konstruktif dan proses demokratisasi yang sehat. Fenomena ini semakin nyata di Amerika Serikat, di mana perpecahan antara kelompok kiri dan kanan semakin tajam.

Kedua belah pihak hampir tidak dapat menemukan titik temu atau kesepakatan dalam membangun konsensus demokrasi, dan alih-alih berbagi ruang demokratis yang adil, mereka malah saling berusaha untuk mendominasi dan menyingkirkan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa, meskipun *civil society* seharusnya menjadi ruang untuk kebebasan berpendapat dan pluralisme, dalam praktiknya ia bisa menjadi medan pertempuran ideologi yang merusak demokrasi, bukan mendukungnya.

a. Antifa: Wajah Gerakan Sayap Kiri Amerika Serikat

Antifa adalah sebuah gerakan politik yang terdiri atas individu dan kelompok yang meyakini bahwa fasisme masih menjadi ancaman serius terhadap masyarakat yang demokratis dan damai. Oleh karena itu, menurut mereka, fasisme harus dilawan melalui tindakan yang luar biasa. Termasuk aksi-aksi radikal, dan dalam beberapa kasus, dengan kekerasan atau cara-cara ilegal. Nama Antifa berasal dari bahasa Jerman *antifaschistisch*, yang merujuk pada kelompok anti-fasis di Jerman pada dekade 1930-an. Di Amerika Serikat, Antifa mulai mendapat perhatian besar pasca pengangkatan Donald Trump pada tahun 2016. Kemunculan mereka beriringan dengan bangkitnya kelompok *alt-right*, yaitu aliansi longgar dari tokoh dan organisasi politik sayap kanan ekstrem yang mengusung pandangan reaksioner tentang ras, demokrasi, gender, dan liberalisme secara umum. Kelompok-kelompok yang diasosiasikan dengan Antifa biasanya menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah. Mereka aktif dalam memprotes hasil pemilu, mengganggu acara-acara politik sayap kanan, serta memiliki keterlibatan besar dalam demonstrasi seperti *Unite the Right Rally* di Charlottesville.

Aksi ini memperlihatkan retorika anti-Semit dan kekerasan dari kelompok supremasi kulit putih serta neo-Nazi, yang membuat sebagian kalangan kiri menjadi lebih simpatik terhadap taktik Antifa. Walaupun banyak pihak di kiri membela Antifa sebagai bentuk perlawanan terhadap fasisme, kekerasan yang mereka lakukan juga menuai kritik dari berbagai arah. Beberapa tokoh dari Partai Demokrat secara terbuka mengecam tindakan mereka, sementara sebagian pihak menilai bahwa pendekatan kekerasan yang digunakan Antifa justru memberi celah bagi kelompok kanan untuk membangun narasi kesetaraan moral antara ekstremisme sayap kanan dan sayap kiri. Setelah kematian Charlie Kirk, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris domestik. Ia menuduh kelompok ini telah merekrut, melatih, dan meradikalisasi pemuda Amerika untuk melakukan kekerasan politik. Ia juga menyatakan bahwa aparat penegak hukum federal akan bersikap “sangat tegas” dalam menangani pergerakan tersebut (BBC, 2025).

b. Moderat vs Ekstrimisme: Segmentasi Gerakan Sayap Kanan

Kehadiran Donald Trump dalam politik Amerika Serikat secara signifikan mengubah lanskap politik nasional. Ia memperlebar polarisasi antara kelompok kiri dan kanan, serta antara Partai Demokrat dan Partai Republik, mendorong keterlibatan politik yang lebih intens di kalangan masyarakat, dan menjadi katalis bagi munculnya berbagai gerakan politik baru. Sayap kanan Amerika tidak homogen, melainkan tersegmentasi tajam antara kelompok pro-Trump dan anti-Trump. Kelompok pro-Trump mencakup organisasi seperti *Proud Boys* dan *Oath Keepers*, yang dikenal menggunakan tindakan ekstrem dalam aktivitas politik mereka, termasuk aksi kekerasan di ruang publik. Sementara itu, kelompok anti-Trump, seperti *Never Trump Movement*, menempuh jalur politik damai dan menolak penggunaan kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana loyalitas terhadap Trump membentuk identitas politik baru sekaligus menimbulkan ketegangan internal di kalangan pendukungnya.

Proud Boys, didirikan pada 2016 oleh Gavin McInnes, mengusung identitas “chauvinis Barat” dan ideologi konservatif pro-Trump, berpadu dengan nilai libertarian dan pandangan tradisional tentang gender. Setelah McInnes mundur pada 2018, Enrique Tarrio memimpin kelompok ini dan memperluas pengaruhnya di tingkat nasional. Tarrio menggunakan etnisnya serta keberadaan anggota non-kulit putih untuk menepis tuduhan supremasi kulit putih, meskipun tetap terlibat dalam perilaku antagonis dan diduga melanggar hukum. Kelompok ini dikenal karena konfrontasi dengan Antifa di kota-kota besar seperti Portland, New York, serta beberapa wilayah di Oregon dan Washington. Setelah penyerbuan Capitol pada 6 Januari 2021, struktur nasional *Proud Boys* melemah akibat tuntutan pidana terhadap pimpinan mereka.

Oath Keepers, didirikan Stewart Rhodes pada 2009, merupakan milisi sayap kanan anti-pemerintah yang mengusung teori konspirasi dan menyerukan penggulingan pemerintah melalui kekerasan. Mereka menyebut diri sebagai “penjaga republik”, meski terlibat bentrokan bersenjata dengan aparat, intimidasi pengunjuk rasa, dan ancaman kekerasan. Sejumlah anggota menghadapi dakwaan kriminal serius, mulai dari kepemilikan senjata ilegal hingga pornografi anak, dan kelompok ini dilarang di media sosial karena aktivitas militansinya. Loyalitas mereka terhadap Trump terlihat sejak Pemilu 2016, termasuk pengawasan tempat pemungutan suara dan keterlibatan dalam kerusuhan Capitol 2021. Kedua kelompok ini

menunjukkan fragmentasi dan militansi di kubu kanan pro-Trump serta memperkuat polarisasi politik di Amerika Serikat.

Di sisi lain, konservatif anti-Trump menggunakan media dan penggalangan dana untuk mempertahankan pengaruh politik dan mengkritik Trump. The Lincoln Project, salah satu organisasi dalam gerakan Never Trump, dikenal karena kampanye provokatif mereka, termasuk “*Trump Not Like Us*” dan kampanye yang mengkritik penanganan Trump terhadap dokumen Jeffrey Epstein. Kampanye ini menyoroti isu perdagangan anak dan dugaan keterlibatan Trump, meskipun dokumen terkait belum dipublikasikan. Selain itu, mereka menyerang figur penting pemerintahan Trump, seperti Kash Patel, Robert Kennedy Jr., dan Pete Hegseth. Pihak pro-Trump menilai kelompok ini sebagai “pengkhianat” dan melabeli politisi Partai Republik yang mendukung mereka sebagai RINO (*Republican In Name Only*).

Bentrokan ideologis antara sayap kanan pro-Trump dan kelompok anti-Trump maupun kiri ekstrem seperti Antifa memperlihatkan polarisasi yang tajam di masyarakat Amerika. Loyalitas terhadap tokoh politik, perbedaan interpretasi visi politik, dan tindakan konfrontatif di ruang publik menjadikan *civil society* sebagai arena perjuangan ideologi yang intens. Dalam konteks ini, baik kelompok ekstrem kanan maupun kiri menunjukkan bahwa peran mereka dalam politik dapat merusak proses demokrasi, sekaligus memperkuat identitas politik kelompok masing-masing. Fenomena ini menegaskan bahwa lanskap politik Amerika pasca-Trump sangat terfragmentasi, namun dinamis, dengan garis pemisah antara moderat dan ekstremis yang kadang kabur.

c. Konflik Kiri dan Kanan

Perpecahan antara kelompok kiri dan kanan di Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada perbedaan ideologis, tetapi juga tercermin melalui pertukaran verbal maupun konfrontasi fisik. Pertukaran ini dapat berupa debat yang saling menghormati atau hinaan-hinaan kecil, namun beberapa insiden berujung pada bentrokan fisik. Peristiwa besar yang menandai eskalasi kekerasan politik muncul sepanjang dekade 2010-an, dengan momen penting terjadi pada tahun 2017. Salah satunya adalah unjuk rasa “*Unite the Right*” di Charlottesville, Virginia, yang mempertemukan kelompok ekstrem kanan seperti supremasi kulit putih, neo-Nazi, dan milisi untuk memprotes pemindahan patung Jenderal Konfederasi Robert E. Lee. Acara ini diorganisir oleh Jason Kessler, mantan anggota *Proud Boys* sekaligus pemimpin gerakan *alt-right*, dan menghadapi pengunjuk rasa tandingan, termasuk aktivis Antifa, pemimpin agama, dan penduduk setempat. Pertemuan tersebut berkembang menjadi pertempuran jalanan yang brutal.

Perkelahian di Charlottesville menewaskan seorang wanita berusia 32 tahun, Heather Heyer, ketika James Alex Fields Jr., seorang supremasi kulit putih, menabrakkan mobilnya ke arah pengunjuk rasa anti-fasis. Selain korban jiwa, total 41 orang terluka, termasuk 26 akibat tabrakan mobil dan 15 akibat perkelahian di jalanan, dengan beberapa cedera mengancam jiwa. Insiden ini menimbulkan kecaman luas di seluruh negeri dan menjadi sorotan media internasional. Setelah peristiwa ini, pimpinan *Proud Boys* berusaha menjaga jarak dari gerakan *alt-right* dan mengurangi persepsi bahwa kelompok tersebut rasis. Namun, anggota dan cabang-cabangnya tetap terlibat dalam provokasi politik jalanan dan kekerasan terhadap demonstran sayap kiri. Gugatan sipil terhadap penyelenggara *Unite the Right* menyoroti penerimaan kekerasan oleh supremasi kulit putih, neo-fasis, dan individu neo-Nazi yang hadir.

Selain Charlottesville, Berkeley, California menjadi medan konflik antara kelompok kiri ekstrem dan kanan ekstrem sepanjang tahun 2017. Awal konflik bermula dari rencana pidato kontroversial Milo Yiannopoulos di University of California, Berkeley, yang ditentang lebih dari 100 anggota fakultas. Kerumunan lebih dari 1.500 orang berkumpul di luar gedung, namun 150 anggota *black bloc* yang mengaku sebagai Antifa menyusup dan mengganggu protes. Kekerasan muncul dalam bentuk pembakaran, pelemparan bom molotov, kembang api ke arah polisi, serta perkelahian jalanan. Kerugian diperkirakan mencapai \$100.000. Demonstrasi ini menimbulkan ketegangan antara mahasiswa damai dan kelompok bersenjata, termasuk Oath Keepers yang bertindak sebagai “keamanan” bagi sayap kanan ekstrem.

Pada bulan April 2017, Stewart Rhodes dan anggota *Oath Keepers* berpartisipasi dalam demonstrasi penuh kekerasan menentang kelompok kiri ekstrem di Berkeley. Mereka bertindak sebagai pengaman bersenjata bagi kelompok seperti *Proud Boys* dan *Patriot Prayer*, sementara bentrokan fisik terjadi dengan pelemparan kembang api, bom asap, dan semprotan merica. Dua puluh satu orang ditangkap, termasuk yang menggunakan senjata mematikan, sementara sebelas orang terluka dan enam di antaranya dibawa ke rumah sakit, termasuk satu korban penusukan. Pada Juni 2017, *Oath Keepers* kembali bertindak sebagai pengaman bagi *Proud Boys* dan kelompok ekstrem lain seperti *Vanguard America* dan *Identity Evropa* dalam unjuk rasa “*March Against Sharia*”. Acara ini dimobilisasi oleh teori konspirasi bahwa Muslim Amerika berupaya menggantikan hukum Amerika dengan hukum Syariah. Aktivis anti-fasis juga hadir sebagai kontra-demonstran, menambah ketegangan di lokasi.

Tanggal 6 Januari 2021 menjadi momen penting lainnya setelah protes George Floyd mereda, ketika sekelompok sayap kanan menolak hasil Pemilu 2020 dengan menyebarkan teori konspirasi tentang kecurangan. Para pendukung Trump berkumpul di Washington D.C. untuk memprotes kemenangan Joe Biden. Di balik layar, *Oath Keepers* dan *Proud Boys* merencanakan serangan terhadap Gedung Capitol, memberikan arahan melalui media sosial kepada anggota mereka untuk hadir pada 6 Januari. Protes dimulai dengan tenang, bertujuan menghalangi sesi Kongres untuk mengesahkan hasil pemilu. Ketegangan meningkat setelah pidato Donald Trump di hadapan para pendukungnya. Peristiwa 6 Januari 2021 menunjukkan eskalasi konflik antara kelompok sayap kanan dan pemerintah serta pendukung demokrasi. Baik *Oath Keepers* maupun *Proud Boys* berperan aktif dalam mobilisasi massa dan tindakan kekerasan yang mengarah pada upaya penggagalan demokratisasi hasil pemilu. Insiden ini menjadi puncak dari rangkaian bentrokan politik yang berlangsung selama bertahun-tahun antara kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri di Amerika Serikat. Konfrontasi-konfrontasi sebelumnya, seperti di Charlottesville dan Berkeley, menjadi preseden bagi taktik intimidasi dan kekerasan jalanan yang digunakan pada peristiwa ini. Fenomena ini menegaskan fragmentasi politik di Amerika, di mana loyalitas ideologis, aksi kekerasan, dan pertentangan moral berperan dalam memicu polarisasi sosial.

Dalam 15 menit pidatonya, ia mulai mendesak mereka untuk bergerak menuju Gedung Capitol. "Saya tahu bahwa semua orang di sini akan segera berbaris menuju Gedung Capitol untuk menyuarakan pendapat Anda secara damai dan patriotik," ujar Trump. Saat presiden berpidato, kerumunan di luar Gedung Capitol semakin membesar. Mereka mulai bergerak menuju barikade polisi dan berhasil melewati para petugas. Polisi, yang kalah jumlah, berusaha menahan mereka. Para pengunjung rasa menerobos barisan polisi Capitol yang melindungi tangga sisi barat, yaitu sisi yang menghadap Gedung Putih. Kerumunan yang semakin membesar akhirnya mulai memadati seluruh halaman Gedung Capitol. Di tengah kekacauan tersebut, kelompok *Proud Boys* terlihat menjadi pihak yang paling aktif dalam mendorong massa untuk maju dan menembus barikade polisi. Tercatat Lebih dari 200 anggota Proud Boys berkumpul di Monumen Perdamaian dan melancarkan serangan untuk merebut W. Plaza, tepat saat Sidang Gabungan mulai mengesahkan suara elektoral. Mereka tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga mengambil posisi kepemimpinan di lapangan, mengarahkan massa untuk terus mendekat ke gedung utama. Sementara itu, kelompok *Oath Keepers*, yang datang dengan perlengkapan taktis lengkap dan bergerak dalam formasi "*stack*" teratur layaknya militer, mulai berkoordinasi untuk memasuki gedung melalui sisi timur.

Ketika bentrokan mencapai puncaknya, anggota *Proud Boys* berhasil menembus pintu dan jendela Capitol, menjadi kelompok pertama yang membuka jalan bagi ribuan pengunjung rasa lainnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, *Oath Keepers* memasuki gedung dengan formasi rapat, menjaga komunikasi melalui radio dan aplikasi terenkripsi untuk memastikan pergerakan mereka tetap terorganisir. Pada pukul 14:40, polisi dalam jumlah yang cukup berhasil masuk ke Gedung Capitol untuk mempertahankan terowongan Capitol dari para penyerang, yang memaksa mereka untuk mundur. Peningkatan kehadiran polisi ini cukup untuk mulai mendorong para penyerang keluar dari gedung dan mengambil pendekatan ofensif untuk merebut kembali Capitol. Kekerasan dari para perusuh meningkat, yang mengakibatkan seorang petugas polisi diseret ke tengah kerumunan dan dipukuli. Seorang perusuh ditembak hingga tewas. Pada pukul 18:15, Gedung Capitol berhasil diamankan sepenuhnya. Dampak dari peristiwa tersebut, lima orang meninggal dunia dan empat petugas polisi melakukan bunuh diri setelah serangan itu. Tarrio dan Rhoades masing masing dijatuhkan hukuman penjara, Tarrio dijatuhi hukuman 22 tahun dan Rhodes divonis 18 tahun penjara, namun mereka, bersama dengan 1500 demonstran lainnya, diberi ampun atas kejahatannya oleh Trump pada Januari 2025.

Posisi *Turning Point USA* dalam *Civil Society* Amerika Serikat

Secara teoretis, *civil society* memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi melalui stabilisasi ekspektasi sosial, pembentukan norma-norma partisipatif, serta penyediaan ruang bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi secara damai (Schmitter, 1997). Dalam konteks ini, *Turning Point USA* (TPUSA) pada awalnya dapat dipahami sebagai bagian dari *civil society* karena ia menyediakan wadah bagi partisipasi politik anak muda, khususnya mahasiswa, dalam wacana publik Amerika Serikat. Melalui berbagai kegiatan seperti konferensi tahunan, kampanye advokasi kebijakan konservatif, dan mobilisasi politik di tingkat kampus. TPUSA tampak berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik generasi muda. Secara positif, keberadaan TPUSA mencerminkan fungsi *civil society* sebagai kanal ekspresi politik yang lebih dekat dengan masyarakat), serta membantu menyalurkan identitas ideologis kelompok konservatif dalam sistem demokrasi yang pluralistik. Namun sedemikian yang dikemukakan Alagappa (2004) menyatakan bahwa *civil society* merupakan arena kekuasaan, ketidaksetaraan, perjuangan, konflik, dan koordinasi di antara berbagai identitas serta kepentingan. Dengan demikian, tidak semua elemen *civil society* otomatis mempercepat demokratisasi; sebagian bahkan bersikap anti-demokrasi. Dalam konteks ini, cara *Turning Point USA* (TPUSA) beroperasi menunjukkan kecenderungan serupa.

Organisasi ini kerap menekan suara-suara yang berbeda pandangan, Salah satu inisiatif paling kontroversial yang diluncurkan TPUSA adalah *Professor Watchlist*, yang pertama kali muncul pada tahun 2016. Daftar ini berfungsi untuk menamai dan "mempermalukan" para profesor yang dianggap mendiskriminasi atau menyebarkan pandangan yang berseberangan dengan ideologi konservatif, khususnya yang dianggap merugikan mahasiswa yang berpandangan kanan. Menurut Tiede dalam (Fucci, 2019), terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang dinyatakan untuk mencantumkan profesor karena perilaku mereka di dalam kelas dan praktik sebenarnya dari situs Professor Watchlist. Hanya sedikit lebih dari setengah profesor yang tercantum di situs tersebut karena insiden yang melibatkan perilaku di dalam kelas; sebaliknya, banyak dari mereka yang masuk daftar tersebut karena keterlibatan politik mereka tanpa mengatasnamakan kampus. Beberapa di antaranya telah melaporkan menerima email yang bersifat rasis, misoginis, dan mengancam akibat pencantuman mereka di Professor Watchlist. Fakta bahwa TPUSA mengelola situs web yang secara eksplisit menargetkan profesor universitas memberikan konteks mengapa protes di UNL terjadi. Selain itu, TPUSA juga meluncurkan School Board Watchlist pada 2021, yang bertujuan untuk mengawasi dan mengkritik dewan sekolah yang dianggap bertindak bias terhadap nilai-nilai konservatif atau siswa dengan pandangan politik berbeda, terutama mengenai kewajiban memakai masker dan vaksinasi saat masa pandemi COVID-19, program keberagaman dan inklusi, serta kurikulum yang membahas topik ras dan gender.

Praktik tersebut dinilai mengancam kebebasan akademik dan keselamatan pribadi, sekaligus menebarkan ketakutan terhadap inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Selain itu, TPUSA membangun pengaruh politik kampus lewat strategi sistematis untuk “membajak” pemerintahan mahasiswa. Mereka secara aktif mendanai kandidat-kandidat mahasiswa konservatif agar, setelah terpilih, dapat mengalihkan pendanaan dari organisasi progresif dan mendorong kebijakan yang melindungi pembicara sayap kanan (Kolowich & Fucci, 2019). Di satu sisi, langkah ini bisa dipandang sebagai upaya melindungi kebebasan berekspresi mahasiswa konservatif. Namun di sisi lain, dukungan finansial eksternal menciptakan ketimpangan sumber daya dan berpotensi mendominasi ruang politik kampus, sehingga kebijakan badan mahasiswa lebih diarahkan untuk memenuhi agenda TPUSA.

Kedua kasus tersebut secara fundamental tidak hanya menimbulkan ketimpangan kekuasaan, tetapi juga mengikis norma demokrasi dalam ekosistem akademik. Publikasi data personal para profesor dapat memicu pelecehan siber, mengintimidasi tenaga pengajar, dan mendorong mekanisme swasensor (*self-censorship*) untuk menghindari ancaman terhadap reputasi maupun keselamatan. Di sisi lain, injeksi dana eksternal bagi kandidat mahasiswa konservatif menciptakan arena kompetisi yang timpang (*uneven playing field*), yang melemahkan kontestasi ide secara adil dan menurunkan mutu deliberasi publik di lingkungan kampus. Ketika lembaga kemahasiswaan lebih sibuk merespons agenda penyandang dana ketimbang mengakomodasi kebutuhan komunitas akademik yang majemuk, proses perumusan kebijakan menjadi sarat akan bias dan bersifat eksklusif. Artinya, strategi TPUSA bukan hanya bertujuan memperkuat representasi konservatif, melainkan juga berpotensi mentransformasi universitas yang semestinya menjadi ruang diskursus terbuka menjadi sebuah medan hegemoni politik pro sayap kanan, membatasi pluralisme pandangan, dan mereduksi nilai-nilai luhur demokrasi yang seharusnya dilindungi.

Turning Point USA (TPUSA) merepresentasikan sebuah kontradiksi fundamental antara status hukum dan praktik di lapangan. Sebagai organisasi nirlaba 501(c)(3), TPUSA menikmati keuntungan bebas pajak dengan syarat mutlak untuk tetap non-partisan dan tidak terlibat dalam kampanye politik. Namun, berbagai investigasi dan kesaksian menuduh organisasi ini secara sistematis melanggar aturan tersebut, bertindak seolah-olah sebagai perpanjangan tangan dari agenda politik konservatif. Organisasi ini diduga memanfaatkan status nirlabanya untuk tujuan politik yang seharusnya menjadi ranah partai politik, melampaui batasan hukum yang telah ditetapkan. Bukti aktivitas partisan TPUSA sangat beragam. Laporan dari media seperti *The New Yorker* (2017) mengungkap kesaksian mantan karyawan yang menyatakan organisasi ini secara diam-diam bekerja untuk kampanye kandidat Partai Republik di ajang pemilu 2016. Selain itu, konferensi tahunan mereka secara eksklusif menampilkan pembicara pro-Trump dan tokoh konservatif, yang berfungsi sebagai ajang mobilisasi politik. Intervensi mereka dalam pemilu mahasiswa untuk memenangkan kandidat konservatif juga merupakan bentuk kampanye politik praktis. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan dari organisasi nirlaba 501(c)(3).

Sifat partisan *Turning Point USA* (TPUSA) semakin tampak jelas melalui sosok pendirinya, Charlie Kirk, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Donald Trump. Sejak Trump meraih nominasi Partai Republik pada tahun 2016, TPUSA secara terbuka dan penuh semangat memberikan dukungan. Bahkan, dalam kampanye pemilu umum tahun itu, Kirk berperan langsung sebagai ajudan pribadi Donald Trump Jr., putra sulung sang mantan presiden. (KSLA, 2025) Dalam pemilu 2024, sayap politik TPUSA turut mengambil peran aktif dalam upaya mobilisasi pemilih untuk mendukung Trump,

dengan fokus khusus pada konservatif yang selama ini apatis atau jarang menggunakan hak pilihnya. Hasilnya terlihat nyata: Trump berhasil merebut kembali negara bagian Arizona, kampung halaman TPUSA, dengan selisih lima poin setelah sebelumnya kalah tipis pada 2020 (KSLA, 2025).

Kemenangan ini bukanlah kebetulan. Trump menunjukkan kekuatan bertahan politiknya dengan memberikan hasil konkret. Melalui TPUSA dan jaringan organisasi lainnya, ia menggelontorkan puluhan juta dolar untuk kampanye mobilisasi pemilih menjelang pemilu. Strategi ini membuahkan hasil signifikan, termasuk perolehan mengejutkan dalam kelompok pemilih muda, sekitar 45 persen secara nasional. Serta persaingan ketat dengan kandidat Demokrat, Kamala Harris, di sejumlah negara bagian kunci. Implikasi dari praktik ini sangatlah serius. Dengan menyamarkan aktivitas politik di balik non-profit, TPUSA dituduh telah mengubah status nirlaba menjadi kendaraan di mana donasi politik yang besar dapat disalurkan secara anonim dan bebas pajak. Hal ini menciptakan medan permainan politik yang tidak adil dan merusak transparansi. Lebih jauh lagi, ketika batasan antara advokasi tulus dan agenda politik tersembunyi menjadi kabur, kepercayaan publik terhadap seluruh sektor nirlaba dapat terkikis, menimbulkan keraguan apakah sebuah organisasi benar-benar melayani kepentingan umum.

Keterlibatan ini menandai pergeseran fungsi *civil society* dari wadah partisipasi warga menjadi instrumen politik partisan yang bertujuan merebut kekuasaan, melanggar prinsip dasar masyarakat sipil. Akibatnya, TPUSA bukan hanya mempersempit ruang dialog publik yang inklusif, tetapi juga memperkuat bias sistemik dalam distribusi pengaruh politik sebagaimana dicatat Schmitter bahwa *civil society* bisa menjadi “*chorus with an upper-class accent*,” di mana kelompok berpengaruh mendominasi kebijakan publik. TPUSA membangun jaringan pemuda dan memanfaatkan media untuk menyebarkan ideologi sayap kanan. Mereka mendorong kebijakan pro-kepentingan sendiri, seperti penolakan *Critical Race Theory*, dukungan terhadap kebijakan imigrasi ala Trump, serta penyebaran narasi *Christian Nationalism* yang anti-Islam dan anti-LGBTQ+. Melalui kampanye dan debat publik, TPUSA membingkai posisi mereka agar tampak benar, terutama di bawah pemerintahan Trump yang mendukung gerakan sayap kanan.

Menurut studi *Southern Poverty Law Center* tahun 2024, *Turning Point USA* atau TPUSA menggunakan retorika sayap kanan ekstrem dengan menempatkan agama Kristen sebagai agama yang superior, serta membangun narasi tentang adanya penganiayaan terhadap umat beragama untuk membenarkan visi otoriter yang mengancam demokrasi Amerika Serikat. Melalui politik ketakutan, TPUSA menanamkan gagasan bahwa supremasi kulit putih dan Kristen sedang diserang oleh kelompok seperti imigran, komunitas LGBTQ+, dan aktivis hak sipil, sehingga masyarakat didorong untuk melindungi “cara hidup tradisional.” Charlie Kirk, dalam pidatonya yang mendukung Donald Trump pada tahun 2024, bahkan memperingatkan para pendeta bahwa kebebasan akan hilang jika mereka tidak bertindak, sebuah pernyataan yang menegaskan strategi mobilisasi berbasis ketakutan tersebut. Pasca pandemi COVID-19, TPUSA juga mengeksploitasi reaksi konservatif terhadap sekolah negeri dengan menyerang pendidikan inklusif, teori ras kritis, dan buku bertema LGBTQ+, sembari mempromosikan sistem pendidikan rumah atau *homeschooling*. Selain itu, TPUSA mendorong peran gender tradisional dengan menuding feminisme sebagai ancaman sosial. Hal ini tampak dalam acara *Young Women’s Leadership Summit* tahun 2024 ketika Alex Clark menyerukan agar perempuan menanggalkan ambisi karier dan kembali pada peran domestik. Menurut pandangan Schmitter, salah satu dampak negatif dari keberadaan *civil society* adalah terjadinya distribusi pengaruh yang tidak seimbang dalam proses perumusan kebijakan publik antara kelompok masyarakat atas dan bawah. Jika dikaitkan dengan ukuran dan pengaruh TPUSA sebagai organisasi nirlaba besar, mereka memiliki kapasitas untuk mendorong kebijakan yang mendukung kepentingannya sendiri. Melalui penyebaran narasi ketakutan, TPUSA mampu menggerakkan massa untuk menekan para legislator agar mendukung kebijakan yang selaras dengan ideologi mereka. Karena ideologi TPUSA berdekatan dengan orientasi politik pemerintahan sayap kanan yang diwakili Partai Republik, hal ini berpotensi memarginalisasi kelompok yang mereka anggap sebagai lawan, seperti imigran dan komunitas LGBTQ+.

Turning Point USA tidak hanya berperan sebagai organisasi advokasi konservatif, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam mobilisasi gerakan radikal yang berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi di Amerika Serikat. Aktivitas mereka mencakup upaya sistematis untuk menantang hasil pemilu, menyebarkan disinformasi, serta membentuk opini publik melalui narasi konspiratif yang menggerus kepercayaan terhadap institusi demokratis. Salah satu manifestasi paling jelas dari peran tersebut adalah keterlibatan organisasi afiliasinya, *Turning Point Action*, dalam mendukung pawai “*March to Save America*” yang diinisiasi oleh Donald Trump pada 6 Januari 2021. Bersama sejumlah kelompok sayap kanan lainnya, organisasi ini memfasilitasi keberangkatan massa dengan menyediakan bus bagi para pendukung Trump menuju Washington D.C., yang kemudian berujung pada penyerangan Gedung Capitol sebagai simbol otoritas negara.

Keterlibatan ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari proses mobilisasi yang telah dibangun jauh sebelumnya. Sejak 6 November 2020, pendiri Turning Point USA, Charlie Kirk, telah berperan aktif dalam mengorganisir gerakan “*Stop the Steal*” di Phoenix dan juga bersama-sama Turning Point Action dalam unggahan platform Twitter (sekarang X) yang dihapus, mengaku telah mengirim lebih dari 80 bus yang membawa para pendukung Trump ke Washington, D.C., dan salah satu peserta yang difasilitasi dalam perjalanan tersebut kemudian dinyatakan bersalah bersama sekitar 1.500 pelaku lainnya atas keterlibatan mereka di Insiden Januari 6 2021. Ironisnya, setelah Trump memberikan pengampunan kepada 1.500 demonstran insiden 6 Januari yang berstatus terpidana, Trump mengeluarkan kebijakan melabeli Antifa sebagai organisasi teroris, terjadi insiden pemecatan seorang profesor di Rutgers University setelah TPUSA, melalui cabang kampusnya, menyebarkan petisi yang menuduh profesor tersebut sebagai anggota “Antifa” sekaligus “*domestic terrorist*”.

Posisi *Turning Point USA* (TPUSA) dalam lanskap politik Amerika Serikat merepresentasikan suatu fenomena unik yang menantang klasifikasi konvensional dalam spektrum masyarakat sipil. Secara formal, organisasi ini beroperasi dalam kerangka legal sebagai entitas masyarakat sipil yang moderat. Namun, analisis terhadap praktik-praktiknya menunjukkan deviasi fundamental dari norma-norma demokrasi prosedural sebagaimana dirumuskan oleh Schmitter dan Karl. Dalam konsepsi mereka, esensi demokrasi tidak hanya terletak pada eksistensi partisipasi publik, melainkan juga pada kepatuhan kolektif terhadap aturan main *rules of the game* dan penerimaan terhadap hasil kompetisi politik yang sah, sebuah prinsip yang mereka sebut sebagai *contingent consent*. Di sinilah letak paradoks TPUSA, dimana aktivitasnya secara substantif mengikis fondasi demokrasi, menjadikannya terlalu subversif untuk dikategorikan sebagai moderat, namun strateginya yang berlindung di balik retorika kebebasan berekspresi dan status hukumnya membuatnya tampil terlalu “bersih” untuk dianggap sebagai aktor radikal secara terbuka. Kecenderungan radikalisme TPUSA tidak termanifestasi dalam penolakan eksplisit terhadap sistem demokrasi, melainkan melalui tindakan-tindakan yang secara sistematis mendelegitimasi institusi dan prosesnya dari dalam. Praktik seperti penyebaran disinformasi elektoral, intimidasi terhadap akademisi melalui “Professor Watchlist”, dan fasilitasi mobilisasi massa yang bereskalasi menjadi serangan terhadap institusi legislatif pada 6 Januari 2021, merupakan serangan langsung terhadap integritas prosedur demokrasi. Ironisnya, sambil melabeli lawan politiknya sebagai “teroris domestik”, seperti dalam insiden di Rutgers University, TPUSA sendiri terlibat dalam aktivitas yang menggerus kohesi sosial dan tatanan sipil.

Dengan demikian, TPUSA beroperasi pada zona abu-abu yang memanfaatkan legitimasi dan perlindungan yang disediakan oleh sistem demokrasi untuk menyebarkan narasi yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem itu sendiri. Dari perspektif Schmitter dan Karl, fenomena ini menempatkan TPUSA bukan sebagai komponen fungsional dari masyarakat sipil yang menopang demokrasi, melainkan sebagai manifestasi dari apa yang dapat disebut sebagai *uncivil society* (masyarakat tak sipil). Organisasi ini secara efektif mentransformasikan ruang partisipasi yang seharusnya memperkuat demokrasi menjadi arena untuk subversi, di mana kebebasan dimanfaatkan untuk mengikis fondasi kebebasan itu sendiri. Pada akhirnya, fenomena TPUSA mengilustrasikan paradoks inheren dalam demokrasi modern: bagaimana instrumen kebebasan sipil dapat dimanipulasi menjadi senjata paling efektif untuk melemahkan demokrasi itu sendiri. Dengan memanfaatkan legitimasi hukum dan retorika kebebasan berekspresi, organisasi ini secara sistematis menggerus fondasi demokrasi prosedural yang justru memberikan mereka ruang untuk beroperasi. Tindakan ini secara fundamental menyerang prinsip *contingent consent*, kesediaan kolektif untuk mematuhi aturan main dan menerima hasil proses demokratis yang menurut Schmitter dan Karl merupakan prasyarat vital bagi stabilitas demokrasi. Dengan demikian, TPUSA harus dipahami bukan sekadar sebagai partisipan dalam kontestasi demokrasi, melainkan sebagai sebuah kekuatan korosif yang secara aktif bekerja untuk mendegradasi kualitas dan resiliensi tatanan demokrasi Amerika Serikat. Aktivitas mereka tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi, tetapi juga meracuni diskursus publik dengan polarisasi ekstrem, yang pada akhirnya menguji kapasitas demokrasi liberal untuk mempertahankan diri dari ancaman yang tumbuh dari dalam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan polarisasi di dalam *civil society* Amerika antara sayap kanan dan kiri serta kemunculan Turning Point USA (TPUSA) sebagai organisasi *civil society* sayap kanan merepresentasikan perubahan karakter masyarakat sipil dalam demokrasi liberal kontemporer. Berbeda dengan pandangan normatif yang memposisikan *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang negara dan pendorong demokrasi, TPUSA justru memperlihatkan karakter politik, ideologis, dan instrumental yang kuat. Organisasi ini berkembang sebagai mesin mobilisasi konservatisme politik melalui strategi propaganda ideologis yang sistematis di ruang pendidikan, komunitas generasi muda, dan media digital. Kemampuannya dalam membangun basis dukungan di luar struktur formal partai politik menunjukkan bahwa TPUSA berfungsi sebagai aktor politik non-negara yang efektif.

Polarisasi politik di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana civil society dapat berubah menjadi arena pertarungan ideologi yang dapat mendorong ke area uncivility. Mau tidak mau, kelompok partisan seperti Turning Point USA (TPUSA) dan ekstrimist *Proud Boys*, *Oath Keepers*, maupun Antifa tetap termasuk dalam civil society, tetapi praktik mereka justru kontraproduktif terhadap demokratisasi karena saling mendominasi dan menegasikan pihak lain. Kehadiran Donald Trump memperdalam polarisasi antara sayap kiri dan kanan serta memunculkan gerakan-gerakan radikal, seperti *Proud Boys* dan *Oath Keepers* di kanan, serta Antifa di kiri, yang sama-sama menggunakan kekerasan dalam politik. Konflik fisik besar, seperti di Charlottesville (2017), Berkeley (2017), dan penyerbuan Gedung Capitol (2021), memperlihatkan bagaimana kekerasan politik dan loyalitas ideologis menggantikan dialog demokratis. Peristiwa-peristiwa ini menandai transformasi civil society Amerika dari ruang partisipasi inklusif menjadi medan konfrontasi ekstrem, di mana batas antara moderat dan radikal semakin kabur, memperkuat polarisasi sosial dan melemahkan fondasi demokrasi.

Turning Point USA (TPUSA) berada dalam posisi abu-abu di masyarakat sipil Amerika Serikat. Secara legal, organisasi ini tampak sebagai entitas moderat, namun dalam praktiknya kerap menyimpang dari norma-norma demokrasi. Dengan berlandung di balik retorika kebebasan berekspresi, TPUSA justru melakukan berbagai tindakan yang melemahkan institusi demokrasi, seperti penyebaran disinformasi, intimidasi terhadap akademisi, serta mobilisasi massa yang berujung pada kekerasan politik. Organisasi ini memanfaatkan legitimasi demokrasi untuk menyebarkan narasi yang justru merusaknya dari dalam. Melalui upaya menanamkan ideologi Christian Nationalism yang tidak inklusif terhadap kelompok masyarakat yang berbeda pandangan, seperti komunitas non-Kristen dan LGBTQ+, TPUSA turut memperdalam polarisasi sosial. Keterlibatan mereka dalam gerakan Stop the Steal, sebuah teori konspirasi tanpa bukti yang memicu salah satu peristiwa politik paling brutal di abad ke-21, serta usaha mereka menginfiltrasi politik kampus dengan mendanai calon-calon mahasiswa yang konservatif, turut menciptakan ketimpangan dalam dunia akademik. Selain itu, inisiatif seperti Professor Watchlist berpotensi memicu kampanye pelecehan terhadap dosen atau akademisi yang tercantum di situs mereka. Karena itu, TPUSA dapat dipandang sebagai bentuk uncivil society, yaitu kekuatan yang memanfaatkan kebebasan sipil untuk mengikis fondasi demokrasi dan memperdalam polarisasi di Amerika Serikat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa TPUSA memiliki keterkaitan erat dengan jaringan kekuasaan sayap kanan Amerika Serikat, terutama kelompok pro-Donald Trump dalam Partai Republik. Narasi ideologis yang mereka bangun, berupa anti-sosialisme, kebebasan ekonomi, nasionalisme eksklusif, dan konservatisme moral digunakan sebagai alat hegemoni politik untuk menciptakan polarisasi ideologis. Melalui pembingkaihan isu, retorika anti-kiri, dan stigmatisasi oposisi politik, TPUSA berhasil membentuk realitas sosial tandingan (counter-hegemonic narrative) yang memperlemah rasionalitas publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa TPUSA merupakan aktor masyarakat sipil yang berkontribusi pada democratic backsliding di Amerika Serikat. Keterlibatannya dalam gerakan “Stop the Steal” pasca Pemilu 2020, penyebaran klaim delegitimasi terhadap hasil pemilu, serta amplifikasi misinformasi politik memperlihatkan bahwa TPUSA memanfaatkan ruang kebebasan sipil untuk melemahkan legitimasi institusi demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa civil society tidak selalu identik dengan demokratisasi; dalam konteks tertentu, ia dapat menjadi sarana erosi demokrasi dari dalam melalui politisasi identitas dan manipulasi opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arshani, S. (2021, March 3). *Man charged in Capitol riot took a bus paid by Turning Point USA to DC*. Business Insider. <https://www.businessinsider.com/man-charged-capitol-riot-went-dc-bus-turning-point-usa-2021-3>
- Affairs, P., & Berkeley, U. C. (2017, February 2). *Milo Yiannopoulos event canceled after violence erupts*. Berkeley News. <https://news.berkeley.edu/2017/02/01/yiannopoulos-event-canceled/>
- Asrida, W., Marta, A., Hadi, S., & Pemerintahan, J. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi Civil Society, Democracy and Democratization. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(02), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- BBC. (2023, August 2). Capitol riots timeline: What happened on 6 January 2021? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56004916>
- Doubek, J. (2017, June 11). “Anti-Sharia” Marchers Met With Counter-Protests Around The Country. *NPR*. <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/06/11/532454216/anti-sharia-marchers-met-with-counter-protests-around-the-country>
- Fugardi, R. (2025, July 28). *Case Study of the Hard Right | 2024 Year in Hate & Extremism*. Southern Poverty Law Center. <https://www.splcenter.org/resources/reports/turning-point-usa-case-study-hard-right-2024/>

- Guinto, J. (2018, April 7). *Trump's man on campus*. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/charlie-kirk-donald-trump-man-on-campus-turning-point-usa/>
- Hadiwinata, B. S. (2005). Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.22146/jsp.11037>
- Helmores, E. (2025, October 9). *US anti-fascism expert blocked from flying to Spain at airport*. The Guardian; The Guardian. <https://www.theguardian.com/us-news/2025/oct/09/anti-fascism-mark-bray-rutgers-university>
- Hummel, K. (2021, December 22). *The Oath Keepers and Their Role in the January 6 Insurrection*. Combating Terrorism Center at West Point. <https://ctc.westpoint.edu/the-oath-keepers-and-their-role-in-the-january-6-insurrection/>
- Kenny, M. (2025, October 16). “*antifa*.” Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Antifa>
- Kriner, M., & Lewis, J. (2021). *Pride & Prejudice: The Violent Evolution of the Proud Boys*. Combating Terrorism Center at West Point. <https://ctc.westpoint.edu/pride-prejudice-the-violent-evolution-of-the-proud-boys/>
- Lenz, R. (2024, December 3). *The Battle for Berkeley: In the name of freedom of speech, the radical right is circling the Ivory Tower to ensure a voice for the alt-right*. Southern Poverty Law Center. <https://www.splcenter.org/resources/hatewatch/battle-berkeley-name-freedom-speech-radical-right-circling-ivory-tower-ensure-voice-alt/>
- Mayer, J. (2018). *Allegations of Racial Bias and Illegal Campaign Activity at a Conservative Nonprofit That Seeks to Transform College Campuses*. The New Yorker. <https://www.newyorker.com/news/news-desk/a-conservative-nonprofit-that-seeks-to-transform-college-campuses-faces-allegations-of-racial-bias-and-illegal-campaign-activity>
- Mayer J. (2025). Who was Charlie Kirk? His legacy and the rise of Turning Point USA. KSLA News. <https://www.ksla.com/2025/09/11/who-was-charlie-kirk-his-legacy-rise-turning-point-us>
- Muthiah Alagappa. (2004). *Civil Society and Political Change in Asia*. Stanford University Press.
- Mythili Sampathkumar. (2017, August 13). *One dead and dozens hurt as white supremacists clash with anti-fascist campaigners in Virginia | The Independent*. The Independent. <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/violence-clashes-far-right-rally-charlottesville-virginia-latest-unite-the-right-a7890096.html>
- News, J. 6th. (2025, January 21). *Trump pardons roughly 1,500 criminal defendants charged in the Jan. 6 Capitol attack, including those who atta*. January 6th. <https://www.jan-6.com/post/trump-pardons-roughly-1-500-criminal-defendants-charged-in-the-jan-6-capitol-attack-including-thos>
- Paddock, A. (2025, September 25). *How Revenue is Spent at Turning Point USA (2024)*. Paddock Post. <https://paddockpost.com/2025/09/25/how-revenue-is-spent-at-turning-point-usa-2024/>
- Park, M., & Lah, K. (2017, February 2). *Berkeley protests of Yiannopoulos caused \$100,000 in damage*. CNN. <https://edition.cnn.com/2017/02/01/us/milo-yiannopoulos-berkeley>
- Risen, C. (2025, September 10). Charlie Kirk, Right-Wing Force and a Close Trump Ally, Dies at 31. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2025/09/10/us/politics/charlie-kirk-dead.htm>
- Schmitter, P. C. (2011). Some propositions about civil society and the consolidation of democracy. *Nbn-Resolving.org*, 10. <http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/26763>
- Strandquist, S. (2025, January 2). *Thousands gather at AmFest for preview of second Trump term - Berthoud Weekly Surveyor*. Berthoud Weekly Surveyor. <https://berthoudsurveyor.com/thousands-gather-at-amfest-for-preview-of-second-trump-term/>
- Tebaldi, C., & Gaddini, K. (2024). Socialism sucks: campus conservatives, digital media, and the rebranding of Christian nationalism. *Socialism Sucks: Campus Conservatives, Digital Media, and the Rebranding of Christian Nationalism*, 27(8), 1628–1649. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2023.2289979>
- TIMELINE | JANUARY 6TH*. (2021). January 6th. <https://www.jan-6.com/january-6-timeline-old>
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2025, October 17). *Oath Keepers*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Oath-Keepers>
- The Guardian. (2021). *Turning Point: Rightwing youth group faces critics over tactics*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/23/turning-point-rightwing-youth-group-critics-tactic>
- Wendling, M. (2020, September 30). Proud Boys and antifa - who are they and what do they want? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54352635>
- Wendling, M. (2023, May 4). Proud Boys: From storming the Capitol for Trump to protesting drag shows. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65217171>